

Pelaksanaan Koordinasi Dalam Program Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lingkup Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Sorong

Agus A. V. Bieth

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Email.agusavbieth@gmail.com

Abstrak

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Koordinasi Dalam Program Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lingkup Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Sorong. Penelitian ini dilakukan di Kota Sorong. Penelitian tentang Pelaksanaan Koordinasi Dalam Program Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lingkup Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Sorong. Untuk menguji pelaksanaan koordinasi menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan secara Analisis Kualitatif dan Diskriptif Kualitatif dengan berdasarkan kategori hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Semua sumber daya manajemen itu penting, tetapi dalam praktek, manusia sebagai sumber daya yang paling penting baik dalam arti jumlahnya maupun dalam arti mutu atau kualitasnya. Hambatan-hambatan atau kesalahan-kesalahan yang dialami terutama disebabkan oleh sumber daya manusia yang tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan. 2) Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penguatan otonomi daerah yang diselenggarakan pemerintah, sangat ditentukan adanya efektifitas pelaksanaan dari hubungan kerja, karena tanpa adanya hubungan kerja yang jelas, pelaksanaan tugas-tugas pokoknya dapat menjadi tidak efisien, karena adanya ketidak paduan kegiatan yang berlangsung. 3) Koordinasi fungsional, antara dua atau lebih instansi yang mempunyai program yang berkaitan. 4) Koordinasi instansional, terhadap beberapa instansi yang menangani satu urusan tertentu yang bersangkutan. 5) Koordinasi fungsional, terhadap dua atau lebih wilayah dengan program tertentu.

Kata Kunci : Pelaksanaan Koordinasi, Program Pelaksanaan Tugas, Fungsi Lingkup Sekretariat

PENDAHULUAN

Program Otonomi Daerah sebagai cerminan kebijakan desentralisasi fiskal merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai perundang-undangan yang berlaku, yang memberi peluang cukup besar bagi Pemerintah Daerah, meningkatkan kinerja pembagunan sumber daya yang dimilikinya, dengan kepemilikan wewenang yang lebih besar dalam penentuan kebijakan di daerah, kecuali dalam hal bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan yang lain yang sifatnya nasional. Koordinasi merupakan

salah satu variable yang penting dalam manajemen Pemerintahan. Melalui Koordinasi yang intensif dan berkala, akan menciptakan sinergi pelaksanaan pemerintahan di berbagai bidang. Sebaliknya tanpa koordinasi yang baik, maka masing-masing instansi atau bagian akan berjalan sendiri-sendiri dan menonjolkan program-programnya. Kondisi tersebut, akan berdampak pada tumpang tindihnya program-program pemerintahan dan tidak efisien dan efektifnya pencapaian tujuan pemerintahan. Dalam konteks pelaksanaan koordinasi pencapaian program lingkup sekretariat pemerintah Kota Sorong. Terutama mengoptimalkan mekanisme penyelenggaraan pemerintah secara Bottom- up (dari bawah) dan Top-down (dari atas). Penyelenggaraan pemerintah yang didesain berdasarkan pendekatan Bottom-up tersebut nampaknya sangat ideal dan bisa melahirkan program-program pemerintahan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat lokal sesuai dengan skala prioritas pembangunan yang mendesak dalam suatu wilayah. Dengan koordinasi yang baik diantara berbagai elemen pemerintahan, maka secara ideal hasil akan sesuai dengan harapan semua masyarakat.

Namun demikian, berbagai fenomena yang cenderung dalam upaya pegawai memaksimalkan pelaksanaan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, antara lain faktor koordinasi, koordinasi antar pegawai diharapkan selalu dapat berlangsung optimal baik antar sesama pegawai (horisontal) maupun dengan sesama atasan (vertikal). Karena patut disadari, bagaimanapun terampilnya seseorang dalam suatu tugas dan tanggung jawab yang diberikan harus ditunjang dengan kemampuan mengadakan koordinasi. Apabila hal tersebut diabaikan orang tersebut akan menghadapi suatu kendala di belakang hari. Kita pahami bersama bahwa tidak selamanya seseorang mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan sendiri-sendiri melainkan harus dengan bantuan orang lain. Karena bagaimanapun manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Dalam lingkup sekretariat Pemerintah Kota Sorong dalam mencapai program belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini disebabkan karena antara suatu bagian dengan bagian lainnya masih saling jalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi, ini dapat dibuktikan ketika setiap bagian menyusun program, terkadang ditemukan adanya tumpang tindih program pada hal bagian tersebut berada pada satuan kerja perangkat daerah sekretariat daerah sehingga penetapan program terdapat berbagai masalah khususnya dalam penetapan kegiatan dan anggaran dalam lingkup sekretariat. Hal ini nampak sering terjadinya program atau kegiatan yang tidak sesuai dengan bidang tugas pokok yang diemban misalnya bagian yang seharusnya mengawasi pembangunan justru melakukan kegiatan yang sifatnya fisik. Adapun

tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Koordinasi Dalam Program Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lingkup Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Sorong.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Sorong. Penelitian tentang Pelaksanaan Koordinasi Dalam Program Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lingkup Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Sorong. Untuk menguji pelaksanaan koordinasi menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan secara Analisis Kualitatif dan Diskriptif Kualitatif dengan berdasarkan kategori hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan koordinasi dalam pencapaian program lingkup sekretariat daerah dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik di Kota Sorong

Manajemen Pemerintahan

Semua instansi pemerintah, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri, perdagangan dan organisasi-organisasi politik dan sosial mempunyai maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan itu membutuhkan penanggung jawab yang diberi nama pimpinan (manager). Pimpinan yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya melaksanakan tugas kepemimpinan dan kegiatan-kegiatan yang disebut manajemen.

Bentuk Koordinasi dalam Pemerintahan

Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen diantara fungsi yang lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian. Fungsi koordinasi adalah untuk menghubungkan unit-unit yang ada dalam organisasi atau antar organisasi. Oleh karena itu dalam sebuah institusi atau organisasi tidak dapat berfungsi dengan baik bila koordinasi tidak dilaksanakan dengan baik. Koordinasi diperlukan karena dalam, suatu organisasi terdapat adanya perbedaan dalam satuan, pekerjaan, orang atau pejabat. Perbedaan itu ada karena adanya pembagian tugas pekerjaan dan tanggung jawab yang mengarah kepada spesialisasi, sebagai konsekwensi berorganisasi atau bekerja sama.

Implikasi Koordinasi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah

Kemajuan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan telah berdampak terhadap adanya semangat dari berbagai pelaku pembangunan di daerah untuk semakin mempermantap penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mempermantap penyelenggaraan pemerintah tersebut, dibutuhkan koordinasi yang baik diantara sesama satuan/unit organisasi. Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen diantara fungsi yang lainnya seperti pencernaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian. Fungsi koordinasi adalah untuk menghubungkan unit-unit yang ada dalam organisasi atau antar organisasi. oleh karena itu dalam sebuah institusi atau organisasi tidak dapat berfungsi dengan baik bila koordinasi tidak dilaksanakan dengan baik. Koordinasi sangat penting untuk menghindarkan kecenderungan pemisahan diri dari unit-unit yang dibentuk sebagai akibat adanya spesialisasi fungsi (pembagian habis tugas menjadi fungsi-fungsi) di dalam organisasi. Keuntungan akan koedinasinya tercipta sinergi, yaitu tercipta perpaduan usaha dari berbagai unit atau organisasi yang menghasilkan output yang lebih dibandingkan dengan jumlah output masing-masing unit atau organisasi bila mereka bekerja tanpa organisasi.

Manfaat dan Dampak Kurangnya Koordinasi

Apabila dalam organisasi dilakukan koordinasi maka ada beberapa manfaat yang akan dipetik yaitu: (a) dengan koordinasi dapat dihindarkan perasan lepas satu sama lainnya antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi. (b) dengan koordinasi dapat dihindarkan perasan atau suatu pendapat bahwa satuan organisasinya atau jabatannya merupakan yang paling penting. (c) dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan antara satu organisasi atau antar pejabat. (d) dengan koordinasi dapat hindarkan timbulnya rebutan fasilitas. (e) dengan koordinasi dapat dihindarkan terjadinya peristiwa waktu menunggu yang memakan waktu lama. (f) dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya pengerjaan terhadap satu aktifitas oleh satuan-satuan organisasi atau kekosongan pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat. (g) dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap tugas oleh para pejabat. (h) dengan koordinasi dapat ditimbulkan kesadaran diantara pejabat untuk saling membantu satu sama lain diantara sesama pejabat yang ada dalam satuan organisasi yang sama. (i) dengan koordinasi dapat ditimbulkan kesadaran antar pejabat untuk saling memberitahu masalah yang dihadapi bersama sehingga dapat terhindarkan kemungkinan terjadinya kebaikan bagi dirinya.,

keselamatan bagi dirinya atas kerugian atau kejatuhan sesama pejabat lainnya. (j) dengan koordinasi dapat dijamin sikap antar pejabat, (k) dengan koordinasi dapat dijamin adanya kebijaksanaan antar pejabat. (l) dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan langkah antar pejabat. (m) dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan langkah tindakan antar pejabat.

Manajemen dalam Penyelenggaraan Pemerintah

Manajemen dibangun berlandaskan praktek-praktek terbaik manajemen, yang dibantu oleh pendekatan-pendekatan, pengarahan-pengarahan, teknik-teknik dan sikap-sikap baru, sekalipun terlihat bahwa manajemen telah berkembang secara sistimatikal, dampaknya bersifat revolusioner. (Sudarmayanti, 2005 : 5). Dengan demikian berkembangnya organisasi yang serba dinamis, semakin kompleks, dengan ciri keterbukaan, demokratik dan sebagainya, maka penerapan manajemen tradisional (dengan model: Efisiensi, hubungan antar manusia dan sumber daya manusia) perlu lebih dilengkapi lagi. Dengan organisasi yang semakin kompleks maka diperlukan kemampuan analisis keputusan yang semakin meningkat, karena ini semua merupakan salah satu ciri manajemen modern.

Pencapaian Koordinasi yang Efektif

Efisiensi adalah hubungan antara *input* dan *output*. Efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi untuk mencapai output tertentu. Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain : 1) Efisiensi pada sektor usaha swasta (*private sector efficiency*), dijelaskan dengan konsep *input output* yaitu rasio *input* dan *output*; 2) Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat (*public sector efficiency*), adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dengan pengorbanan semaksimal mungkin. 3) suatu kegiatan yang dapat dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya (input) minimal diperoleh hasil (*output*) yang diinginkan. Beberapa cara untuk meningkatkan efisiensi adalah dengan meningkatkan output dengan input yang sama, atau dengan menaikkan output dengan proporsi yang besar dengan kenaikan output yang proporsional, atau juga dengan menurunkan input dengan proporsi yang besar dan menurunkan output secara proporsional.

KESIMPULAN

Kesimpulan sebagai berikut: 1) Semua sumber daya manajemen itu penting, tetapi dalam praktek, manusia sebagai sumber daya yang paling penting baik dalam arti jumlahnya maupun dalam arti mutu atau kualitasnya. Hambatan-hambatan atau kesalahan-kesalahan yang dialami

terutama disebabkan oleh sumber daya manusia yang tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan. 2) Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penguatan otonomi daerah yang diselenggarakan pemerintah, sangat ditentukan adanya efektifitas pelaksanaan dari hubungan kerja, karena tanpa adanya hubungan kerja yang jelas, pelaksanaan tugas-tugas pokoknya dapat menjadi tidak efisien, karena adanya ketidak paduan kegiatan yang berlangsung. 3) Koordinasi fungsional, antara dua atau lebih instansi yang mempunyai program yang berkaitan. 4) Koordinasi instansional, terhadap beberapa instansi yang menangani satu urusan tertentu yang bersangkutan. 5) Koordinasi fungsional, terhadap dua atau lebih wilayah dengan program tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko, T. Hani. 1988 . Manajemen. Edisi II, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Manila 1996 , Pengantar Administrasi dan Manajemen, Balai Pustaka, Jakarta.
- Nazir,M. 1988 . Metode Penelitian PT Ghalia Indonesia. Jakarta
- Sedarmayanti, 1995 . Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja. Ilham Jaya Bandung.
- Syamsi, I. 1983 . Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen. Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Sugiono, 2003 . Metode Penelitian Administrasi. Penerbit Alfabetha, Bandung.
- Salusu, J, Dr, M.A. 1996 . Pengambilan Keputusan Stratejik. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Tunggal, A.W. 1995 . Akuntansi Sumber Daya Manusia. Rineka Cipta, Jakarta.
- Umar, H. 1998 . Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suhardi Bambang. 2008. *Perencanaan Sistem Kerja dan Ergonomik Indutry* Jilid 2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
- Tarwaka, Cs. 2004. *Ergonomi Untuk Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Produktivitas*. Uniba Press Surakarta
- Wayne R. Pall dan Don F. Faules. 1998. *Komunitas Organisasi dan Strategi Meningkatkan Kinerja PERusahaan*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Wursanto, IG. 1989. *Manajemen Kepegawaian* Jilid I dan Jilid 2. Kansius Yogyakarta
- Wionojosoebrolo Sritomo 2000. *Ergonomi Studi gerak dan Waktu Tehknik Untuk Analisis Peningkatan Produktivitas Kerja*. Guna Widya Surabaya.

Mortimer. R. Feinberg. 1979. *Psikologi Yang Efektif Untuk Pemimpin, Pejabat dan Usahawan*. Jakarta

Moenir.S.A.H. Drs.2008. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara Jakarta

Nurmianto, Eko (2000). *Ergonomi Studi Gerak dan Waktu*. Surabaya

Dokumen-dokumen

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Sorong tahun 2006.

Peaturan Daerah Nomor 1 tahun 2003 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Kota Sorong .

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.